

POLITISASI AGAMA DALAM PEMILU

Aldi Saputra, Dinda khairatun Nisa, Nabila Fauziah

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

aldi245y@gmail.com, dindakhairatunnisa02@gmail.com,
nabilafauziah593@gmail.com

Abstract

Pancasila as a state ideology shows that Indonesia is not a secular country even though it cannot also be called a religious state. Every individual and group has the fundamental right to voice their views on political views, freedom of opinion is one of the pillars of democracy. One of the concerns when the politicization of religion is used excessively is the bad image of religion if the elected leader's behavior and policies conflict with the religious issues raised during the campaign alone. The prohibition on the politicization of religion is when using religious teachings for pragmatic, practical political purposes, resulting in manipulation and exploitation of religion.

Key words: politicization of religion, elections, politics

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler walau tidak bisa juga disebut sebagai negara agama. Setiap individu dan kelompok memiliki hak fundamental untuk menyuarakan pandangan mereka dalam pandangan politik, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi. Salah satu hal yang dikhawatirkan ketika politisasi agama digunakan secara berlebihan ialah buruknya citra agama jika pemimpin

yang terpilih nanti perilaku dan kebijakannya bertentangan dengan isu keagamaan yang dibawakan pada saat kampanye semata. Larangan politisasi agama adalah ketika memperlakukakan ajaran agama untuk kepentingan pragmatis politik praktis, sehingga terjadi manipulasi dan eksploitasi agama.

Kata kunci: politisasi Agama, Pemilu, politik

PENDAHULUAN

Secara teoretis hakikat pemilu adalah untuk membangun sistem demokrasi berkeadilan, sehingga semua pihak wajib menghormati beda pilihan, karena dengan berbeda-beda pilihan maka mesin demokrasi sudah benar-benar berjalan. Ada fakta menarik dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, bahwa teori demokrasi semakin tertinggal dari realitas berdemokrasi, fenomena tersebut secara terang benderang tersaji melalui kampanye hitam yang tujuannya untuk menyerang pihak lawan secara verbal seperti membakar posko pemenangan, membakar bendera partai, membakar mobil operasional partai, dan membakar rumah simpatisan. Dalam bentuk non verbal berupa teror, dan ancaman-ancaman menjelang pelaksanaan pemilu hingga di hari penetapan pemenang pemilu (Firdaus M. Yunus, 2023). Selain beberapa fakta di atas, politik identitas dan politisasi agama adalah salah satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam konteks pemilu sekarang dan akan datang. Politik identitas mengacu pada praktik politik yang didasarkan pada karakteristik kelompok tertentu seperti etnis, agama, dan suku. Ketiga kelompok tersebut menjadi aktor yang memiliki kemampuan mempengaruhi pemilih dalam mengambil keputusan politik masing-masing.

Politisasi agama adalah praktik mengaitkan keyakinan agama dengan agenda politik tertentu, dengan tujuan mendapatkan dukungan dan mempengaruhi opini publik. Hal ini sering melibatkan penggunaan simbol-simbol agama, retorika religious, dan narasi yang bersifat dogmatis untuk mencapai tujuan politik. Kedudukan agama di negara Indonesia ini sangat penting, karena Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan bahwa Indonesia

bukanlah negara sekuler walau tidak bisa juga disebut sebagai negara agama. Setiap individu dan kelompok memiliki hak fundamental untuk menyuarakan pandangan mereka dalam pandangan politik, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi. Orang-orang memiliki hak untuk membawa nilai-nilai dan keyakinan mereka dalam proses politik untuk membentuk kebijakan yang mencerminkan aspirasi.

Salah satu hal yang dikhawatirkan ketika politisasi agama digunakan secara berlebihan ialah buruknya citra agama jika pemimpin yang terpilih nanti perilaku dan kebijakannya bertentangan dengan isu keagamaan yang dibawa pada saat kampanye semata. Dari kajian-kajian tersebut perlu ditelusuri sejauh mana isu politisasi agama ditulis dan perkembangannya perlu diketahui untuk meyakinkan bahwa apakah isu ini akan terus muncul ketika pemilihan umum diadakan (Mihsan, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar penelitian dan analisis. Beberapa pengertian tentang politisasi agama dalam pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Politisasi agama

Politisasi agama adalah bentuk manipulasi politik terhadap pemahaman dan pengetahuan agama-agama melalui penggunaan dakwah, kehumasan, propaganda, atau menafsirkannya dalam bentuk penurunan kesadaran, permasalahan, dan keterpaparan. Dalam pendidikan keagamaan, maka dilakukan tekanan untuk mempengaruhi gagasan keagamaan untuk mencoba memasukkan kepentingan sesuatu ke dalam politik, manipulasi sosial, kebijakan, di dalam penyampaiannya ke masyarakat.

2. Agama di tahun pesta politik

Tantangan yang dihadapi negara menyambut tahun perayaan politik baik di tingkat legislatif, daerah, dan presiden, adalah memperkuat politik agama.

Islam sendiri bukanlah sesuatu yang tabu dalam politik. Dalam Islam, politik kadang-kadang digunakan sebagai alat utama untuk menjamin penerapan ajaran dan filsafat Islam dan untuk mencapai tujuannya. Ditulis pada masa keemasan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, para khalifah Racidon dan beberapa masa keemasan para khalifah dan penguasa pada Abad Pertengahan. Di sini perkataan Imam al-Ghazali menemukan relevansi bahwa agama dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan analisis studi literatur. Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politisasi agama. Penyajian dilakukan dengan mengkaji sejumlah bahan pustaka yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menyertakan fenomena-fenomena sosial tertentu secara objektif Kemudian menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan penelitian dengan memanfaatkan media online seperti portal berita atau website. Data yang di gunakan adalah karya-karya yang ditulis dalam bentuk artikel-artikel jurnal terkait pemilu. Semakin menguatnya politik identitas dan politisasi agama di Indonesia.

2. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Sehingga Penulis menekankan untuk mengeksplorasi tentang politisasi agama yang telah menjadi fenomena sosial menjelang tahun pemilu. Dalam hal ini dapat diketahui ketika tahun politik berlangsung pembahasan atau penelitian tentang politisasi agama apakah banyak di tulis

oleh para pemerhati di bidang politik atau justru sebaliknya. Dengan cara ini mendapatkan gambaran yang konkret mengenai pemilu, politisasi, agama dan menguatnya politik identitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralistik karena memiliki akar-akar keberagaman dalam berbagai aspek seperti agama, etnis, seni, tradisi, budaya, pandangan, serta cara hidup. Sosok keberagaman yang indah ini, dengan latar belakang mozaik-mozaik yang memiliki ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Motto nasional “Bhineka Tunggal Ika” yang diadopsi oleh bangsa Indonesia memperkuat konsep "kesatuan dalam keberagaman" atau "keragaman dalam kesatuan" di berbagai bidang kehidupan nasional kita. Pluralitas kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam konteks agama, telah lama menjadi objek kajian para ahli antropologi, sosiologi, sejarah, dan pakar lainnya. Keberagaman agama di Indonesia dapat menjadi kekuatan yang positif dan konstruktif ketika dituntun dengan positif dan konstruktif pula. Sebaliknya, pada sisi lain, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan negatif dan destruktif apabila tidak diarahkan secara positif dan situasi seperti ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa atau Republik ini, seperti yang penulis katakan di awal. Itulah alasannya, para pendiri bangsa ini setelah mengalami perdebatan konstitusional yang berkepanjangan, tidak mendirikan negara Indonesia sebagai negara beragama atau berdasarkan satu agama tertentu, melainkan mereka sepakat untuk memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya terkenal sebagai "Negara Pancasila". Ia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokratis.

Sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan oleh UUD 1945. Salah satu prinsipnya yaitu kekuasaan mayoritas. Dapat dipahami bahwa kekuasaan mayoritas berpegang teguh pada kedaulatan rakyat. Dimana

golongan yang memiliki suara terbanyaklah yang berkuasa dibanding dengan golongan minoritas. Namun, disamping ketidakadilan yang hadir di tengah-tengah demokrasi terdapat jaminan hak asasi manusia, persamaan hak di depan hukum, dan pembatasan pemerintahan oleh konstitusi yang akan menghindari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kekuasaan mayoritas yang berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat mengharuskan para wakil yang terpilih untuk dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan-tindakannya (Siti Faridah, 2018).

Dalam perkembangannya, “politisasi agama mempunyai kesan negatif atau berkonotasi menghina”. Padahal, sejak pertama kali “lahirnya” agama, yakni sejak pertama kali muncul di muka bumi ini, politisasi agama sudah cukup banyak. Oleh karena itu, politis mempunyai aspek. Fenomena lengsernya Gus Dur menjadi rujukan sejarah penting terhadap dinamika politik pasca reformasi di bawah pemerintahan Amin Rais yang juga tokoh agama Muhammadiyah. Meski menyatakan dirinya netral secara institusional, namun Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan posisi politiknya sendiri. Kedua tokoh tersebut beradu argumen mengenai dua lembaga besar yang berada di Indonesia: Badan MPR dan Badan Kepresidenan. Tentu sangat menarik, ada dua tokoh Islam yang memainkan peran strategis saat itu. Masing-masing membawa gerbong besar, Gus Dur membawa tank NU, dan Amin Rais membawa gerbong Muhammadiyah. Rephrase skenario Politik Saat itu, agama terlihat jelas dengan mata telanjang. Amin Rais yang dikenal sebagai pendiri reformasi politik Indonesia berhasil menghancurkan kejayaan orde baru selama 32 tahun melalui Soeharto yang memiliki kepemimpinan militer yang kuat.

Amin Rais menganjurkan reformasi dan mencoba menggulingkan militer. Pada tahun tentara kembali ke barak. Peta politik Amin Rais dibaca oleh kaum intelektual, dan hasratnya akan kekuasaan masih terlihat jelas dalam dirinya, dan saat itu ia yakin jika terpilih, ia akan menjadi presiden dan memimpin demokrasi tanpa embel-embel pendapatnya terlihat bahkan oleh jurnalis.

Beberapa agama muncul sebagai "pemberontakan teologis" atau "protes budaya" terhadap kesombongan, dan keinginan akan kekuasaan menjadikan agama sebagai media, sarana, dan alat untuk mencapai tujuan politik praktis. Politik agama, sebaliknya menjadikan agama sebagai landasan utama politik bahkan mengangkatnya menjadi ruh-ruh dan landasan aktivitas politik. Jangan sampai terjadi perpecahan dalam bidang politik, karena agama mengajarkan persatuan. Mengapa politisasi agama tidak boleh? Larangan politisasi agama adalah ketika memperalat ajaran agama untuk kepentingan pragmatis politik praktis, sehingga terjadi manipulasi dan eksploitasi agama. Kementerian agama menekankan bahwa nilai agama yang hakikatnya berlaku universal itu tak boleh direduksir hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.

KESIMPULAN

Politisasi agama di Indonesia merupakan fenomena dimana agama digunakan baik oleh individu maupun kelompok politik sebagai alat atau simbol politik untuk mencapai tujuan tertentu. Fenomena ini sering terjadi, terutama dalam konteks pemilu dan kampanye politik. ketika kandidat dan partai politik mengeksploitasi sentimen agama untuk mendapatkan dukungan publik, politisasi agama dapat meningkatkan ketegangan sosial, mengancam persatuan, dan berujung pada polarisasi sosial. Berbagai faktor penyebab politisasi agama seperti motif kekuasaan, kurangnya pemahaman dan pendidikan politik, dan lain sebagainya. Peran lembaga keagamaan hendaknya menjaga

independensi dari politik nyata dan fokus pada peningkatan moralitas dalam masyarakat tanpa memihak calon atau partai tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid, A. S. (2024). Refleksi Pemilu 2024 terhadap Politisasi Agama di Media Sosial Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Gunung Djati Conference Series*.
- Arifin, I. (2022). Agama dalam Pelaksanaan dan Kemenangan Pemilu Pilpres, sebagai Sebuah Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1049-1057.
- Firdaus M. Yunus, T. H. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 122-124.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Mihsan, K. (2023). Politisasi Agama dalam Kajian Bibliometrik. *Gunung Djati Conference Series*, 226-227.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Siti Faridah, J. M. (2018). Politisasi Agama Pemecah Keutuhan bangsa dalam Pemilu. *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 489-506.